

# Petahana Independen dalam Perspektif *Powercube*

Ahmad Fajar Rahmatullah<sup>1</sup>, Tunjung Sulaksono<sup>2</sup>

Diserahkan: 7 Juli 2021 | Diterima: 15 November 2021 | Diterbitkan: 3 Desember 2021

## Abstrak

*Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis fenomena petahana jalur independen dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 dalam perspektif teori powercube oleh John Gaventa. Penelitian ini menarik karena calon petahana yang merupakan kader PAN yang notabene PAN mendominasi politik di tingkat lokal justru memilih jalur independen pada periode kedua. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, analisis dokumen, dan studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan dimensi level dan dimensi ruang sangat memengaruhi keputusan petahana untuk bertarung melalui jalur independen, sedangkan dimensi bentuk, yaitu penggunaan berbagai bentuk kekuasaan menentukan kemenangan petahana dalam kontestasi pilkada. Petahana menyadari bahwa kehilangan mesin partai adalah dari pilihan politik menggunakan jalur independen. Oleh sebab itu, dalam dimensi bentuk, petahana memaksimalkan penggunaan bentuk-bentuk kekuasaan, seperti visible power, hidden power, dan invisible power untuk memenangkan pilkada. Dalam dimensi bentuk inilah power petahana*

---

1 Penulis adalah lulusan Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Email: fajarraahmatullah.a@gmail.com, ahmad.fajar.fisip17@mail.umy.ac.id.

2 Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Email: tunjungsulaksono@umy.ac.id.

*sangat terlihat, khususnya pada hidden power. Hidden power memengaruhi keputusan-keputusan elit di tingkat lokal dalam mendukung petahana mengamankan kemenangan.*

**Kata Kunci:** *Petahana; Independen; Teori Powercube; Pilkada.*

## **PENDAHULUAN**

Munculnya fenomena calon petahana dalam kontestasi pemilu bukanlah sesuatu yang baru, dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak 2020, terdapat 290 calon petahana yang bertarung di 236 daerah atau sekitar 87,40% (CNN Indonesia, 2020). Romi Haryanto dan Robby Nahliansyah merupakan salah satu dari 290 calon petahana yang kembali mengikuti kontestasi pilkada serentak tahun 2020. Pasangan petahana ini memilih menggunakan jalur independen dan sama sekali tidak menggunakan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai kendaraan politik yang sebelumnya mengusung dan memenangkan pasangan petahana tersebut pada pilkada 2015. Padahal, keduanya merupakan kader PAN dan PAN sendiri merupakan partai yang mendominasi, baik posisi eksekutif maupun legislatif sejak pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 1999.

Dominasi PAN dapat dilihat pada pemilu legislatif berdasarkan periode di bawah ini:

**Tabel 1. Data Perolehan Suara Pemilihan Legislatif Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

No	Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode			
		2004 - 2009	2009 - 2014	2014 - 2019	2019 - 2024
1.	<i>Partai Amanat Nasional (PAN)</i>	13	12	15	17
<b>Jumlah Anggota</b>		30	30	30	30
<b>Jumlah Partai</b>		8	11	8	7

Sumber : Diolah oleh Penulis Berdasarkan Data Wikiwand (2020).

Selain menguasai sebagian besar kursi di DPRD kabupaten, partai PAN selalu mencetak kepala daerah dari kadernya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Bupati Tanjung Jabung Timur dari masa ke masa**

No.	Nama	Kader	Awal Menjabat - Selesai Menjabat
1.	<i>Drs. H. Abdullah Hich</i>	PAN	12 April 2001 - 12 April 2011
2.	<i>H. Zumi Zola S.T.P., M.A.</i>	PAN	12 April 2011 - 6 Oktober 2015
3.	<i>H. Romi Haryanto S.E</i>	PAN	12 April 2016 - (Petahana)

Sumber : Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (2019).

Berkaca pada pilkada serentak 2018 lalu, ada 46 bupati/walikota dan 2 gubernur petahana yang kembali

memenangkan pilkada serentak 2018, dimana para kandidat petahana memilih untuk mencalonkan diri dengan partai politik yang sama atau mencoba merangkul partai oposisi lain untuk mengamankan suara (Azanella & Dewi, 2018). Sementara itu, kemenangan calon independen dalam kontestasi politik lokal di Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan oleh Skala Survei Indonesia (SSI) terhadap hasil pilkada serentak tahun 2015, menggambarkan bahwa calon independen yang maju dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 adalah 35%, tetapi hanya 14,4% yang dimenangkan oleh calon independen. Artinya, iklim politik lokal di Indonesia untuk memenangkan calon independen masih sangat rendah. Selain itu, calon independen harus berjuang melawan dominasi petahana dan partai pendukungnya, hal ini memberatkan calon independen untuk menang (Republika.co.id, 2016).

Melihat realitas sejarah politik di tingkat lokal Indonesia, penelitian mengenai seorang petahana yang kembali maju dalam kontestasi pilkada tanpa menggunakan kendaraan partai politik yang telah memenangkannya pada periode sebelumnya terbilang sangat langka. Hal tersebut wajar, mengingat para kandidat yang berstatus petahana lumrahnya maju dengan partai politik yang sama hingga mencoba

merangkul partai oposisi lain demi mengamankan kemenangan (Azanella & Dewi, 2018). Lebih lanjut, petahana yang kembali berkontestasi dalam pilkada memiliki apa yang disebut dengan *aggregate of frame*, yaitu proses mendistribusikan isu dan persoalan yang terjadi di suatu wilayah dan memprioritaskan berbagai persoalan tertentu, baik ekonomi, sosial, agama, kebudayaan, dan lain-lain (Nawawi, 2019, p. 25). Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Fadli (2018), petahana yang berpartisipasi kembali didasarkan pada kalkulasi peluang kemenangan yang dapat diukur melalui kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahannya, pencapaian program pembangunan, politisasi birokrasi, dan memiliki finansial yang tinggi atas konsekuensi demokrasi langsung (*direct democracy*), diperparah dengan pragmatisme partai politik untuk tidak mengambil risiko mendukung kandidat yang berpeluang kalah menjadi faktor yang tidak dapat dikecualikan.

Modalitas inilah yang menguntungkan petahana dibandingkan dengan calon lain. Petahana di atas kertas diunggulkan untuk memenangkan pilkada jika dilihat dari modalitas yang dimiliki. Menurut Marijan (2010), ada tiga modal yang harus dimiliki oleh para calon yang ingin ikut serta dalam pilkada secara langsung, yaitu

modal politik (*political-capital*), modal sosial (*social-capital*), dan modal ekonomi (*economy-capital*). Lebih lanjut, Khoiron dan Siboy (2018, p. 4) mengatakan bahwa hadirnya pemimpin, dalam hal ini sang petahana, di tengah-tengah masyarakat menjadikan hal tersebut sebagai modal politik (*political-capital*) sekaligus modal sosial (*social-capital*) sebagai investasi politik dalam merebut hati dan simpati masyarakat. Hal demikian secara tidak langsung membuat persepsi di masyarakat bahwa apa yang mereka rasakan merupakan hasil jerih payah atas program-program petahana. Modal sosial oleh petahana, meliputi jaringan, status dalam masyarakat (pendidikan, agama, dan lain-lain), kekuatan pengaruh di masyarakat, dan pernah atau sedang dalam memegang organisasi besar dan terhormat di masyarakat, sementara itu modal politik berupa posisi politik, pengalaman berorganisasi massa, reputasi, dan legitimasi yang digunakan untuk menarik dukungan masyarakat (Vikalista *et al.*, 2020).

Selain memiliki modal politik dan modal sosial, modalitas ekonomi atau dana politik juga menjadi faktor pendukung dikarenakan besarnya penggunaan dana politik itu sendiri menjadi wajib mengingat proses politik pilkada memerlukan biaya atau ongkos yang sangat mahal, dimana hal tersebut menjadi tantangan

bagi proses berkembangnya demokrasi di tingkat lokal (Baharuddin & Purwaningsih, 2017, p. 215). Namun, tak jarang juga calon petahana gagal dalam memenangkan kontestasi pilkada. Banyak faktor yang memengaruhi, salah satunya yaitu pada saat menjadi pemimpin tidak dapat menjalankan pemerintahannya dengan baik atau masyarakat tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan seperti dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan di daerah (Muhammad, 2017).

Berkaca pada realita di atas, terlihat bahwa petahana selalu memaksimalkan peluang yang ada pada kajian modalitas yang ia miliki, modal politik menjadi aspek penting dalam menentukan arah kemenangan. Namun, bukannya memaksimalkan modal politik tersebut dengan merangkul dukungan partai politik yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk lebih mengamankan kemenangannya, petahana memilih maju melalui jalur independen. Sementara itu, Romi Haryanto beralasan bahwa maju melalui jalur independen merupakan konsekuensi atas konflik yang terjadi di tingkat pusat antara Amien Rais dan Zulkifli Hasan, dan daripada maju melalui partai politik lain, ia lebih memilih maju melalui jalur independen.

*“Antisipasi saja, sekarang PAN di pusat itu lagi pecah. Antara Amien Rais dan Zulkifli Hasan, takutnya nanti berimbas ke bawah. Daripada saya maju dengan partai lain, saya lebih memilih maju jalur independen.”*  
(IMCNews.ID, 2020c).

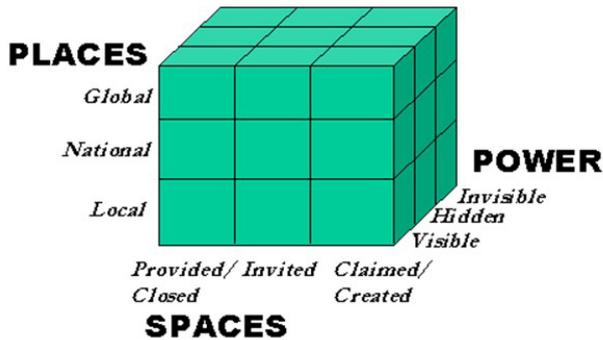
Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis fenomena munculnya petahana independen dalam kontestasi pilkada serentak 2020 berdasarkan perspektif teori *powercube* oleh John Gaventa. Rumusan masalah dalam kajian penelitian ini menarik karena calon petahana yang merupakan kader PAN, dimana PAN mendominasi politik di tingkat lokal pada periode kedua memilih jalur independen. Berdasarkan asumsi konflik elit di tingkat pusat, penulis melihat terciptanya pilihan maju melalui jalur independen oleh Romi Haryanto dapat dianalisis menggunakan teori *powercube* sebagai kerangka analisa.

Teori *powercube* sangat relevan sebagai kerangka analisa karena dapat menjelaskan bagaimana kekuasaan itu diinterpretasikan dalam politik lokal terhadap proses demokratisasi di daerah berkaitan cara kekuasaan memanifestasikan dirinya serta membantu memetakan hal-hal yang berperan dalam kekuasaan, para aktor, persoalan, serta situasi yang melatarbelakangi sekaligus dapat mengantarkan kepada alasan mengapa seseorang

berpotensi memenangkan pertarungan politik (Chalik, 2015, p. 365, 2017, p. 58; Fadli et al., 2018, p. 121; Halim, 2014, p. 55). Oleh sebab itu, teori *powercube* ini dapat menjelaskan hal-hal yang berperan dalam pilihan majunya petahana Romi Haryanto melalui jalur independen berdasarkan kekuasaan yang dimiliki, para aktor, dan persoalan yang melatarbelakangi pilihan tersebut, hingga menjawab bagaimana Romi Haryanto dapat memenangkan kontestasi pilkada serentak 2020 Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanpa partai politik yang selama ini mendukungnya.

Teori *powercube* yang dirumuskan oleh John Gaventa merupakan kerangka analisis baru dalam memahami tentang kekuasaan. Ada tiga aspek yang dilihat dalam kerangka *powercube*, yaitu dimensi level, dimensi ruang, dan dimensi bentuk. Ketiga aspek ini berguna dalam mengeksplorasi berbagai kekuasaan (Chalik, 2017, p. 58; Halim, 2014, p. 55; Powercube.net, 2011b, p. 7).

**Gambar 1. *Powercube Theory***

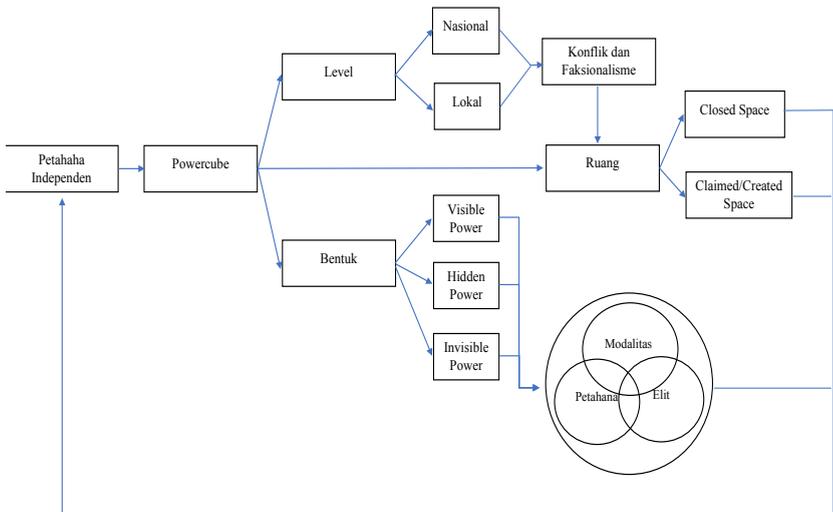


Sumber Gambar : John Gaventa (2006)

Dimensi bentuk dalam teori *powercube* mengacu pada cara kekuasaan memanifestasikan dirinya, yaitu bentuk kekuasaan terlihat (*visible power*), kekuasaan tersembunyi (*hidden power*), dan kekuasaan tak terlihat (*invisible power*). Dimensi ruang pada *powercube* mengacu pada arena potensi partisipasi dan tindakan, termasuk apa yang disebut ruang tertutup (*closed space*), ruang diperkenankan (*invited space*), dan ruang yang diciptakan (*claimed/created space*). Sementara itu, dimensi level dalam *powercube* mengacu pada lapisan yang berbeda dari bagaimana cara pengambilan keputusan serta wewenang yang dimiliki pada skala vertikal, yaitu lokal, nasional, dan global (Chalik, 2017, p. 58; Gaventa, 2006, p. 4; Powercube.net, 2011b, p. 10). Dalam memahami fenomena petahana

independen berdasarkan narasi konflik elit di tingkat pusat hingga potensi munculnya pilihan maju melalui jalur independen oleh petahana Romi Haryanto dapat diamati pada dimensi level teori *powercube* yaitu pada skala vertikal di level nasional dan level lokal dimana pada level ini menjadi cara pengambilan keputusan serta wewenang yang dimiliki oleh petahana dalam menarasikan pilihannya maju melalui jalur independen.

**Gambar 2. Framework Petahana  
Independen Powercube**



Sumber: Diolah oleh penulis.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, analisis dokumen, dan studi pustaka (*Library Research*). Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman. Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013, p. 246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data dilakukan dengan cara *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Manuver Politik, Keresahan di Dimensi Level**

Dimensi level pada teori *powercube* harus dipahami pada lapisan yang berbeda, bagaimana cara pengambilan keputusan tersebut dan seperti apa wewenang yang dimiliki pada skala vertikal, yaitu lokal, nasional, dan global dapat ambil (Chalik, 2017, p. 58; Gaventa, 2006, p. 4; Powercube.net, 2011b, p. 10). Fenomena petahana independen oleh Romi Haryanto dalam konteks dimensi level merupakan manuver politik atas konsekuensi konflik dan faksionalisme di tingkat nasional dan lokal.

Konflik dan faksionalisme partai yang terjadi di tingkat nasional dan lokal yang dialami partai PAN setidaknya menjadi gambaran bagaimana dinamika di tingkat nasional dapat memengaruhi keputusan di bawahnya. Konflik PAN sudah tercium sejak kongres ke IV yang dilakukan di Bali, pasca pemilihan ketua umum partai yang baru, yaitu Zulkifli Hasan menggantikan Hatta Rajasa.

Namun pada saat itu, konflik tidak menimbulkan dualisme kepemimpinan partai, isu dualisme kepemimpinan di tubuh PAN baru tercium pasca kongres ke V yang dilakukan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Konflik terjadi antara pendukung calon ketua umum PAN, yaitu Zulkifli Hasan dan Mulfachri Harahap (Solihah, 2016, p. 1). Konflik juga terjadi antara kelompok Zulkifli Hasan yang cenderung mendukung kebijakan pemerintah dan Amien Rais yang berseberangan dengan pemerintah. Konflik yang memanas tersebut memaksa Zulkifli Hasan mendepak Amien Rais, meskipun Amien Rais senior dan pendiri partai PAN. Zulkifli Hasan kemudian memilih Soetrisno Bachir sebagai Ketua Dewan Kehormatan PAN untuk menggantikan Amien Rais. Hal tersebutlah yang mengakibatkan terbelahnya PAN hingga memunculkan faksi Zulkifli Hasan dan faksi Amien Rais. Perpecahan

tersebut berefek pada sikap politik elit lokal PAN dalam pilkada serentak 2020. Konflik dan faksionalisme tersebut menyebabkan Romi Haryanto enggan untuk tersandera konflik kepentingan di level nasional yang akan memengaruhi potensinya dalam memenangkan pilkada serentak Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020.

Romi Haryanto sebagai petahana dapat dikatakan pada posisi aman untuk melaju pada pilkada serentak 2020, mengingat dengan dukungan 17 kursi yang dimiliki atau sekitar 57% mayoritas kursi di DPRD Kabupaten. Namun, keputusannya maju melalui jalur independen menjadi tanda-tanda adanya keretakan di tubuh partai PAN dan sebagai rencana cadangan yang ia miliki apabila akhirnya ia tidak mendapatkan rekomendasi dari PAN. Seperti yang diketahui bahwa rekomendasi calon bupati dan wakil bupati yang ingin maju melalui jalur partai, lumrahnya dikeluarkan melalui Dewan Pengurus Pusat (DPP), yaitu kekuasaan partai yang berada di level pusat. Dalam sejarah rekomendasi di tubuh partai PAN, seringkali terjadi perubahan yang sangat cepat dan di detik-detik akhir penutupan bisa saja sebuah rekomendasi yang sudah keluar bisa dibatalkan dengan dikeluarkannya rekomendasi baru. Melihat kenyataan konflik dan faksionalisme partai PAN di pusat, inilah

yang menjadi masalah yang sangat diperhitungkan oleh petahana Romi Haryanto sehingga memilih maju melalui jalur independen.

Konflik partai PAN juga terjadi di level lokal berkaitan dengan proses kandidasi di tubuhnya. Lokomotif PAN yang selama ini 100% mendukung Romi Haryanto sebagai bupati Tanjung Jabung Timur mengalami gejolak internal. Hubungan yang tidak harmonis ini dimulai dari konstelasi Pilpres 2019 yang lalu. Romi Haryanto dianggap tidak menuruti instruksi partai PAN yang pada saat itu mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subyanto dan Sandiaga Uno. Keputusan Romi Haryanto tersebut merupakan pilihan politik pribadi yang ia ambil berdasarkan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo dan 32 Bupati lain pada 31 Juli 2018 di Istana Bogor. Para bupati tersebut tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dimana salah satu hasil pertemuan tersebut ialah menyampaikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk menjabat selama dua periode (Faruq, 2018). Hal ini tidak terlalu mengejutkan, karena manuver politik yang dilakukan oleh Romi Haryanto selalu berdasarkan kalkulasi yang matang dan atas dasar peluang yang menguntungkannya.

Gejolak internal lain yang terjadi di partai PAN disebabkan tidak harmonisnya hubungan Romi Haryanto sebagai bupati dan juga sebagai ketua DPD PAN Tanjung Jabung Timur terhadap A. Bakrie yang merupakan ketua DPW PAN Provinsi Jambi. Tidak harmonisnya hubungan Romi Haryanto dengan A. Bakrie secara tidak langsung menyulut api yang menyebabkan goyahnya konstelasi politik di internal PAN Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Hubungan yang tidak harmonis tersebut bermula dari adanya gerakan lima bupati di provinsi Jambi yang melakukan pertemuan di Kerinci untuk mendukung cawagub yang berasal dari luar partai dibandingkan dengan mendukung A. Bakrie sebagai kader internal partai PAN untuk maju sebagai cawagub pada pilkada serentak Jambi tahun 2020 (Nusantara, 2020). Diperparah dengan munculnya isu mahar politik agar Romi Haryanto memberikan sejumlah uang kepada DPW PAN Jambi. Namun, Romi Haryanto menepis isu tersebut dengan mengatakan tidak ada mahar dalam surat rekomendasi yang diberikan oleh DPW PAN kepadanya.

*“Saya sampai saat ini tidak pernah ada mahar dalam surat rekomendasi kepada kami. DPW PAN membuka pintu kepada kami. DPW PAN tak membuka penjangkaran karena insya Allah akan mengeluarkan rekomendasi untuk kami.” (IMCNews.ID, 2020a).*

Sementara itu, dalam wawancara terpisah A. Bakrie menanggapi isu majunya pasangan petahana independen terkait isu mahar politik, ia mengatakan bahwa:

*“Jadi pernyataan Romi, apa pun rIsiko yang diputuskan dalam rapat harian DPW PAN kami siap. Semua diserahkan ke DPW bagaimana keputusannya. Silakan ditafsirkan sendiri apa maksudnya. Untuk isu mahar benar-tidak, katanya tidak. Selanjutnya dia bilang apapun keputusan DPW terhadap saya, saya akan tunduk. Jadi, nanti akan diputuskan dalam rapat harian. Tunggu besok, setelah pendaftaran. Yang jelas, dia sudah siap dengan segala rIsiko.”(IMCNews.ID, 2020b).*

Untuk mengklarifikasi dan mendapatkan informasi yang valid terhadap isu konflik dan mahar politik yang beredar di publik, penulis melakukan wawancara kepada Bima Audia Pratama. Ia adalah anak dari petahana independen, Romi Haryanto, sekaligus ketua tim pemenangan milenial Romi-Robby. Ia (Bima Audia Pratama) mengatakan bahwa tidak ada konflik yang terjadi antara ayahnya dengan ketua DPW PAN JAMBI, A. Bakrie.

*”Tidak ada konflik yang terjadi antara Bapak (Romi Haryanto) dengan Bapak H. Bakrie (Ketua DPW PAN). Tapi, menurut saya pribadi mungkin memang pilkada di masa pandemi memang sedikit memberatkan jika berbicara tentang mahar politik.” (Bima Audia Pratama, Hasil Wawancara, 11 Februari 2021).*

Jika dianalisis dari dimensi level, konflik partai dan faksionalisme yang terjadi di tubuh PAN (pusat maupun provinsi) memengaruhi dinamika politik di level lokal. Konflik antara Zulkifli Hasan dengan Amien Rais juga konflik antara A. Bakrie dan Romi Haryanto di tingkat lokal memengaruhi terhadap sikap politik petahana. Penulis melihat Romi Haryanto memilih maju menggunakan jalur independen sebagai upaya untuk menghindari dari penyanderaan oleh berbagai kepentingan di tubuh partai PAN.

### **Penciptaan Jalur Independen di Dimensi Ruang**

Dalam teori *powercube*, setiap dimensi terus-menerus saling berhubungan satu sama lain. Misalnya, apa yang terjadi di dimensi level dapat memengaruhi pilihan-pilihan keputusan yang akan diambil di dimensi ruang sebagai arena partisipasi dan nantinya berimplikasi terhadap bagaimana kekuasaan tersebut akan diimplementasikan di dimensi bentuk (Powercube.net, 2011a). Oleh sebab itu, dimensi ruang fenomena petahana independen ini tercipta karena adanya konflik dan faksionalisme di dimensi level, sehingga memengaruhi Romi Haryanto untuk melakukan tindakan, partisipasi, pengambilan keputusan berdasarkan peluang, momen, yang nantinya berpengaruh terhadap kelangsungan serta kepentingan

petahana dalam kontestasi pilkada serentak (Gaventa, 2006, p. 4; Powercube.net, 2011b, p. 18).

Dimensi ruang dalam narasi penciptaan jalur independen tercipta dalam dimensi ruang tertutup (*closed space*). Ruang tertutup merupakan tempat para elit, seperti politisi, birokrat, dan pemimpin untuk membuat keputusan tanpa partisipasi pihak luar (Gaventa, 2006, p. 5; Powercube.net, 2011c, p. 19). Proses di ruang tertutup yang dilakukan oleh petahana Romi Haryanto ialah dengan mengumpulkan dukungan KTP tanpa diketahui oleh petinggi partai PAN di Provinsi Jambi. Dalam wawancara penulis dengan Bima Audia Pratama dikatakan bahwa bahwa tim pemenangan internal mendapatkan 80.000 dukungan KTP, namun yang diserahkan ke KPU Tanjung Jabung Timur sebanyak 30.000 KTP.

*“Sebenarnya jumlah KTP sebagai syarat untuk maju menggunakan jalur independen menurut data tim internal kami telah dikumpulkan berjumlah 80.000 KTP, namun yang kami bawa ke Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Timur sebanyak 30.000 KTP sebagai syarat maju menggunakan jalur independen.” (Bima Audia Pratama, Hasil Wawancara, 11 Februari 2021).*

Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa memang benar alasan sang ayah maju jalur independen untuk mengantisipasi masalah yang dialami oleh partai

PAN di tingkat nasional dan lokal. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa pilihan maju jalur independen merupakan keputusan yang matang. Ketika penulis menyinggung apakah pilihan maju jalur independen dikarenakan mahar politik yang berat di masa pandemi? Bima hanya menjawab bahwa memang benar mahar politik, apalagi di masa pandemi memberatkan.

*“Alasan bapak maju jalur independen merupakan keputusan yang sangat matang, terlebih konstitusi menjamin hal tersebut. Apakah bapak maju jalur independen karena mahar politik yang berat? Saya tidak yakin pasti, tapi kalau ditanya menurut saya mungkin saya bisa bilang bahwa memang mahar politik saat kondisi pilkada di masa pandemi memberatkan.” (Bima Audia Pratama, Hasil Wawancara, 11 Februari 2021).*

Dalam ruang tertutup ini, majunya pasangan petahana Romi Haryanto–Robby Nahliansyah melalui jalur independen, tampaknya merupakan keputusan sepihak yang diambil oleh Romi Haryanto, terkhusus sebagai Ketua DPD PAN Tanjung Jabung Timur pada saat itu dan status sebagai Bupati petahana Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hal tersebut terlihat dari bagaimana reaksi A. Bakrie sebagai Ketua DPW PAN Jambi yang tidak tahu penyebab majunya Romi Haryanto-Robby Nahliansyah melalui jalur independen. Hal tersebut diperkuat dengan beredarnya

Surat Pernyataan Dukungan (form resmi KPU) yang dipakai bagi pasangan calon melalui jalur independen yang beredar untuk mendukung Romi Haryanto dan Roby Nahliansyah, berikut lampiran *fotocopy* KTP sebagai syarat dukungan serta terbentuknya *Liaison Officer* (LO) atas nama Darwis yang mewakili petahana Romi Haryanto-Robby Nahliansyah sebagai calon perseorangan (Nusantara, 2020).

*“Ya, memang ketentuannya kalau dia sudah mendaftar independen dia tidak bisa lagi keluar. Misalnya, dia independen mau masuk lagi ke PAN, tidak boleh lagi jadi memang harus matang-matang. Kalau saya tahu penyebabnya tentu saya tahu akan mengambil langkah apa, saya kira dia main-main, ternyata serius.” ujar A.Bakrie. (RADARJAMBI.CO.ID, 2020).*

Atas langkah yang diambilnya, Romi Haryanto akhirnya dipanggil oleh A. Bakrie untuk mempertanyakan sikapnya sebagai Ketua DPD PAN Tanjung Jabung Timur dalam memilih maju jalur independen. Dari hasil pertemuan itu, A. Bakrie mengatakan bahwa Romi Haryanto tetap pada pendiriannya untuk tetap maju melalui jalur independen.

*“Ada tiga catatan yang kami rangkum setelah mendengarkan langsung dari saudara Romi. Beliau tetap memilih jalur perseorangan, alasan beliau merasa tidak enak hati untuk maju melalui jalur partai karena*

*timnya telah bekerja selama ini, Romi juga membantah bahwa dimintai mahar politik oleh DPW PAN, dan beliau siap menerima segala konsekuensi dari keputusan itu.” (TribunJambi.com, 2020)”.*

Dimensi ruang di atas menggambarkan bahwa pilihan maju melalui jalur independen memang sudah diperhitungkan matang-matang. Penciptaan jalur independen sangat terasa dari bagaimana mudahnya petahana mengumpulkan dukungan KTP yang melebihi batas syarat yang diwajibkan oleh KPUD Tanjung Jabung Timur. Terlebih, penulis menyimpulkan selain konflik yang terjadi di dimensi level, mahar politik di masa pandemi mungkin sangat memberatkan petahana dalam mengonsolidasi dukungan parpol dan memilih menggunakan jalur independen. Dalam dimensi ruang, terutama dalam konteks ruang tertutup (*closed space*) menghasilkan kesimpulan bahwa jalur independen adalah satu-satunya solusi mengingat dengan mudahnya petahana Romi Haryanto mendapatkan dukungan KTP lebih dari persyaratan yang dibutuhkan. Hal ini merepresentasikan bahwa ia telah dengan sangat matang mengalkulasikan peluang yang ia miliki pada dimensi ruang atas penciptaan jalur independen.

## **Manifestasi Kekuasaan Petahana dalam Dimensi Bentuk**

Setiap dimensi yang ada dalam teori *powercube* berhubungan satu sama lain. Apa yang terjadi di dimensi level dapat memengaruhi di dimensi ruang, yang kemudian memengaruhi bentuk kekuasaan di dimensi bentuk—yangmana kekuasaan tersebut memanifestasikan dalam berbagai bentuk, yaitu *visible power*, *hidden power*, dan *invisible power* (Powercube.net, 2011b, p. 13). Dalam kekuasaan terlihat (*visible power*), kekuasaan dapat diartikan sebagai lembaga, aktor dan kepentingan yang merupakan unit-unit penyusun bentuk kekuasaan yang terlihat (Halim, 2014, pp. 55–56). Dalam hal ini, posisi petahana diuntungkan dari jabatan yang melekat dalam status sosial-masyarakat sebagai pemimpin daerah—yang bila ditinjau dari bentuk kekuasaan yang terlihat (*visible forms of power*), petahana memiliki keuntungan terbesar dalam membangkitkan rasa simpati publik dengan berjualan program-program yang sudah mereka jalankan sebelumnya ataupun program yang akan direncanakan selanjutnya.

Berdasarkan penjabaran di atas, keunggulan yang dimiliki oleh petahana dari banyaknya program-program pembangunan pada masa pemerintahannya menjadikan

hal tersebut sebagai keuntungan petahana dalam menarik rasa simpati masyarakat atas jualan program-program pembangunan yang tidak dimiliki oleh calon lain (Fadli *et al.*, 2018, p. 127). Berbicara mengenai majunya petahana dalam konteks keuntungan pada perebutan kekuasaan di daerah, memiliki beberapa keuntungan, yaitu keuntungan langsung dan tidak langsung. Keuntungan langsung, maksudnya yaitu popularitas yang dikenal oleh masyarakat merupakan representasi dari kepala daerah itu sendiri. Ada hubungan yang terjalin sebelumnya antara sang petahana dengan masyarakat, yang menyebabkan kapasitas calon petahana akan lebih mendapatkan tempat di hati masyarakat. Keuntungan kedua, maksudnya calon petahana secara tidak langsung selangkah di atas kertas dari pasangan calon yang lain dalam hal pemetaan geografi, demografi, kapasitas, dan potensi ekonomi di daerah untuk secara sistematis dan empiris memahami budaya dan adat istiadat melalui kinerja mobilisasi perangkat kerja yang ada di dalamnya.

Kapasitas petahana dalam memenangkan suatu pilkada akan dapat memenuhi apa yang disebut dengan *aggregate of frame*, yaitu proses mendistribusikan isu serta persoalan yang terjadi di suatu wilayah tersebut hingga akhirnya petahana akan dapat memprioritaskan berbagai masalah tertentu, baik ekonomi, sosial, agama,

kebudayaan, maupun masalah yang lain (Nawawi, 2019, p. 25). Berdasarkan wawancara penulis dengan saudara Bima (Ketua Tim Pemenangan Milenial dan Anak Bupati petahana), ia menambahkan bahwa memang benar keuntungan sebagai petahana ialah dapat melakukan politik jualan program-program yang dilakukan pada masa pemerintahan sebelumnya. Bima juga menyampaikan bahwa apa yang pasangan petahana dan tim pemenangan Romi Haryanto-Robby Nahliansyah tawarkan kepada masyarakat Tanjung Jabung Timur ialah berkomitmen dan berjanji untuk dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

*“Jujur saya sendiri tidak menutup mata tentang infrastruktur daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang belum maksimal, tapi bapak (Romi Haryanto) berkomitmen ke depannya untuk infrastruktur jalan bukan seberapa panjang jalan nanti yang akan dibangun, tapi seberapa berkualitasnya jalan yang dibangun itu.”*  
(Bima Audia Pratama, Hasil Wawancara, 11 Februari 2021).

Sementara itu, berbicara mengenai kekuasaan yang terlihat (*visible power*) dalam konteks majunya pasangan petahana Romi Haryanto-Robby Nahliansyah melalui jalur independen jika dikorelasikan menurut pendapat Marijan (2010), ada tiga modal yang harus dimiliki oleh

para calon yang ingin ikut serta dalam pilkada secara langsung, yaitu modal politik (*political capital*), modal sosial (*sosial-capital*), dan modal ekonomi (*economy-capital*). Modal politik (*political capital*) yang dimiliki adalah (1) Pengalaman politik mereka sebagai kader partai penguasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur (PAN): pernah menjabat sebagai anggota legislatif dari partai PAN, terkhusus Romi Haryanto merupakan Ketua Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tiga periode dan status sebagai petahana yang dapat mengakomodasikan kekuasaan (*power*) secara legal dalam memaparkan program-program pembangunan yang akan ditawarkan kepada masyarakat; (2) Kekuatan tim pemenangan Internal yang dimiliki oleh petahana, yaitu keberhasilan tim pemenangan untuk dapat mengumpulkan dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat maju dalam kontestasi pilkada serentak 2020 melalui jalur independen yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur; (3) Pencitraan politik Romi Haryanto dalam melakukan pencitraan politik memakai strategi, yaitu mempresentasikan diri melalui aktivitas-aktivitas di masyarakat dengan pengaturan sosial (*social setting*) yang alamiah atau apa adanya. Misalnya, pada momen-

momen hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri yang selalu ada kata sambutan oleh Bupati Petahana, Romi Haryanto, baik secara langsung atau diwakilkan oleh tokoh agama/masyarakat setempat, dan perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Modal Sosial (*social capital*), yaitu (1) Interaksi sosial Romi Haryanto yang di-*branding* sejak lama oleh Romi Haryanto memungkinkan masyarakat Tanjung Jabung Timur mengenali sosok Romi Haryanto hingga akhirnya dapat terbangun suatu pola hubungan interaksi di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari aktivitasnya sebagai Ketua DPRD 3 periode jauh sebelum dilantik sebagai bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada periode pertama. Sosok Romi Haryanto sangat dikenal rajin melakukan silaturahmi langsung kepada masyarakat, tokoh masyarakat, serta tokoh agama. Tidak ada rasa sungkan untuk mendatangi setiap acara yang digelar oleh masyarakat, seperti pesta pernikahan, kegiatan sosial, ataupun mengunjungi masyarakat yang tertimpa musibah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

(2) Kepercayaan masyarakat terhadap Romi Haryanto tidak terlepas bahwa masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengenal baik nama dan wajah Romi Haryanto sebagai Ketua DPRD 3 periode. Hal ini memberikan gambaran bahwa relasi hubungan

atas kepercayaan yang masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur berikan kepada Romi Haryanto itu sendiri sudah terjalin sangat lama. Kemampuan serta pengalaman yang dimilikinya, memungkinkan Romi Haryanto untuk membangun citra yang baik di masyarakat, karena ia mampu menjalin komunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat. Hal itu tidak hanya terjadi saat ia menjabat sebagai bupati tahun 2015, tetapi komunikasi itu sudah terbangun sejak lama sehingga ia mendapatkan kepercayaan besar dari masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Modal ekonomi (*economy capital*) sistem pilkada yang sekarang menggunakan sistem jumlah suara terbanyak sebagai pemenang dengan cara memilih pasangan calon secara langsung, tak hayal mewajibkan setiap calon pasangan memiliki dukungan keuangan (*financial*) sebagai ongkos politik (*political fee*). Ongkos politik yang tinggi tersebut tidak dapat dihindari oleh setiap kandidat yang ingin ikut serta dalam kontestasi pilkada serentak. Dengan demikian, bagi kandidat yang tidak cukup memiliki dukungan *financial*, maka dapat dipastikan tidak dapat memaksimalkan peluang yang ada dalam kontestasi pilkada. Harta kekayaan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah sebagai pejabat publik seyogyanya mempunyai kewajiban untuk dapat

menjelaskan berapa jumlah dan berasal dari mana kekayaannya. Dengan demikian, informasi ini sangat dibutuhkan publik sebagai bagian pertimbangan dalam memilih atau tidak memilih calon tersebut. LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dapat menjadi indikator apakah seseorang mempunyai kepatuhan terhadap peraturan hukum atau tidak. Laporan ini kemudian juga bisa ditelusuri oleh lembaga-lembaga tertentu dan kelompok masyarakat yang ingin tahu lebih detail.

Selain itu, modal ekonomi yang kuat yang dimiliki pasangan petahana independen Romi Haryanto-Robby Nahliansyah mengingat pasangan ini maju melalui jalur independen, artinya mesin partai yang selama ini membantu dalam proses kemenangan pada masa-masa pilkada harus hilang dan digantikan posisinya dengan modal ekonomi oleh pasangan calon itu sendiri. Oleh sebab itu, pasangan petahana baik Romi Haryanto dan Robby Nahliansyah harus memiliki *political fee* yang cukup demi kelangsungan kontestasi pilkada yang akan berlangsung.

**Tabel 4. Laporan Harta Kekayaan Pasangan Petahana  
Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung  
Timur 2020**

No	Nama	Harta Kekayaan
1.	Romi Haryanto	Rp. 4.087.000.000
2.	Robby Nahliansyah	Rp. 598.038.673

*Sumber: Diolah oleh penulis dari data LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).*

*Hidden Power* (kekuasaan tersembunyi) dalam dimensi bentuk merupakan bentuk kekuasaan yang digunakan untuk memengaruhi kepentingan pribadi untuk mempertahankan kekuasaan dan hak istimewa dengan menciptakan hambatan partisipasi melalui cara mengecualikan isu-isu penting dari mata publik atau dengan mengontrol politik “di belakang panggung” (Powercube.net, 2011b, p. 13). Secara konsep, penggunaan bentuk kekuasaan yang tersembunyi (*hidden forms of power*) memiliki tujuan untuk dapat mempertahankan kepentingan seseorang ataupun kelompok dengan cara menciptakan halangan atau gangguan yang dapat membendung partisipasi kritis masyarakat (Halim, 2014, p. 61). Sementara itu, Gaventa dalam Fadli (2018, p. 130) mengatakan bahwa kekuasaan merupakan kekuatan dalam memuluskan kepentingan pribadi,

salah satunya dengan mempertahankan kepentingan. Pada konteks ini, kepentingan yang dimaksud adalah kemampuan petahana dalam mereduksi hasrat politik orang lain.

Penggunaan *hidden power* oleh petahana Romi Haryanto, yaitu dengan mereduksi kepentingan dan mengendalikan para elit partai politik dalam menentukan arah politik mereka, dengan memengaruhi aktor-aktor politik yang berpengaruh dalam lingkup kekuasaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Hidden power* petahana terlihat dari apa yang terjadi di menit-menit akhir pendaftaran bakal calon, beberapa partai politik yang tidak mencalonkan pasangannya ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur justru melakukan manuver politik dengan berbalik memberikan dukungan kepada pasangan petahana Romi Haryanto-Robby Nahliansyah. Padahal sebelumnya, pasangan Romi Haryanto-Robby Nahliansyah telah resmi mendaftarkan diri ke KPU Tanjung Jabung Timur sebagai pasangan independen.

Partai-partai tersebut yaitu Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang memiliki 2 kursi, partai Demokrat yang memiliki 0 kursi, serta partai Golongan Karya (Golkar) yang memiliki 4 kursi, dan yang mengejutkan lagi adalah partai PAN yang memiliki 17 kursi di legislatif akhirnya

justru memberikan dukungan kepada pasangan Romi Haryanto dan Robby Nahliansyah, yangmana PAN sendiri yang mengusung pasangan ini dan menang pada pilkada 2015 yang lalu. Dukungan yang di berikan PAN kepada petahana merupakan suatu manuver politik yang tidak terbayangkan sebelumnya. Mengingat, isu-isu konflik dan faksionalisme yang terjadi antara Romi Haryanto dengan internal partai PAN sangat terekspos ke publik diperkuat dengan narasi petahana yang tidak ingin maju dengan partai lain. Jika kita cermati lebih dalam, dari empat partai politik yang memberikan dukungan kepada pasangan petahana Romi Haryanto-Robby Nahliansyah, tiga partai di antaranya memiliki kursi yang jika ditotalkan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5. Total Jumlah Kursi Partai Politik yang Memberikan Dukungan**

No.	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi di Legislatif Kabupaten Tanjung Jabung Timur
1.	Partai PAN	17 kursi
2.	Partai Golkar	4 kursi
3.	Partai Gerindra	2 kursi
<b>Jumlah Total Kursi</b>		<b>23 kursi legislatif</b>

Sumber: Diolah penulis berdasarkan data KPU Tanjung Jabung Timur

Dari penjabaran tabel tersebut, dapat dilihat bahwa gabungan ketiga partai politik jika ditotalkan adalah 23 kursi legislatif dari 30 kursi yang tersedia. Hal ini bermakna bahwa 76% kekuasaan legislatif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tunduk kepada dominasi serta pengaruh petahana. Padahal secara kuantitas, jumlah kursi yang dimiliki oleh ketiga partai politik tersebut semisal melakukan koalisi untuk melawan dominasi petahana pada pilkada serentak 2020, tampaknya sudah dapat menjadi batu sandungan yang berat, bahkan berpotensi dalam menggulingkan kekuasaan pasangan petahana untuk dapat menjabat kembali pada periode berikutnya.

Namun, dengan kenyataan bahwa partai politik yang notabene-nya adalah kendaraan politik serta legitimasi dari konstituen untuk dapat maju dalam kontestasi politik lokal pilkada serentak 2020 di Tanjung Jabung Timur justru tidak terlihat kuat pengaruhnya di hadapan dominasi pasangan petahana Romi Haryanto-Robby Nahliansyah. Bahkan, untuk sekelas partai PAN yang memiliki 17 Kursi di legislatif pada pileg 2019 sudah dirasa cukup mampu mencalonkan pasangan dari jalur partai mereka sendiri untuk dapat menantang pasangan petahana Romi Haryanto-Robby Nahliansyah tanpa harus melakukan koalisi. Namun kenyataannya, tiga

partai politik yang memiliki kursi di legislatif termasuk PAN sebagai partai yang mendominasi suara terbesar, harus tunduk terhadap dominasi petahana Romi Haryanto-Robby Nahliansyah, yangmana kedua sosok tersebut merupakan pentolan dari partai PAN.

Hal yang dilakukan oleh partai politik tersebut merupakan pragmatisme partai politik untuk tidak mengambil risiko mendukung kandidat yang berpeluang kalah. Artinya, partai politik yang mendukung pasangan petahana independen Romi Haryanto-Robby Nahliansyah sudah tidak dapat dikalahkan, bahkan dengan koalisi partai yang mendukung mereka. Pasangan petahana Romi Haryanto-Robby Nahliansyah membuktikan bahwa pengaruh dominasi serta popularitas sebuah partai politik penguasa tampaknya harus tunduk terhadap tingginya popularitas dan dominasi Romi Haryanto - Robby Nahliansyah. Dengan demikian, pasangan petahana Romi Haryanto-Robby Nahliansyah sama sekali tidak memperlihatkan ketergantungan mereka kepada partai politik mengingat popularitas dan dominasi yang dimiliki sudah dirasa cukup untuk memenangkan mereka kembali.

Hal tersebut juga diperkuat dengan wawancara penulis dengan Bima (Ketua Tim Milenial dan Anak Bupati Petahana), ia mengatakan bahwa dari awal

keputusan yang diambil oleh pasangan petahana adalah memang ingin maju menggunakan jalur independen serta tidak ada konflik yang terjadi antara keinginan maju melalui jalur independen dengan partai yang membesarkan nama pasangan petahana, yakni PAN.

*“Sebenarnya tidak ada konflik internal yang terjadi antara bapak (Romi Haryanto) dengan Partai PAN, karena sampai sekarang bapak masih menjabat sebagai kader partai, sedangkan mengapa memilih maju melalui jalur independen karena apa yang dilakukan bapak ingin memberikan warna baru dalam perpolitikan di Indonesia serta saya tidak munafik bahwa memang benar mahar politik untuk maju dalam perpolitikan di daerah sangat tinggi,” ucap Bima (Wawancara, 11 Februari 2021).*

Namun pada akhirnya, partai politik tersebut mengambil sikap untuk memberikan dukungan kepada pasangan petahana Romi Haryanto-Robby Nahliansyah. Secara tidak langsung, hal ini membuktikan bahwa dominasi kekuasaan yang dimiliki oleh pasangan petahana ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan aktor elit politik lokal dalam mengambil sikap dapat dilihat sebagai bagian dari manuver politik atas *hidden power* pengaruh Romi Haryanto pada aktor elit politik di Tanjung Jabung Timur.

Dengan munculnya dukungan langsung yang diberikan partai politik kepada pasangan Romi Haryanto dan Robby Nahliansyah, setidaknya memberikan beberapa hal positif yang penulis lihat. **Pertama**, pasangan petahana Romi Haryanto-Robby Nahliansyah secara tidak langsung di samping memiliki masa yang militan dan loyal terhadap Romi Haryanto-Robby Nahliansyah, juga mendapatkan dukungan dari partai politik yang memiliki mesin politik yang kuat. **Kedua**, pasangan petahana Romi Haryanto-Robby Nahliansyah secara tidak langsung tidak tersandera kepentingan partai, dimana selama ini pasangan yang menang dalam suatu kontestasi pemilihan cenderung melakukan pertanggungjawaban kepada partai. Keputusan maju melalui jalur independen juga secara tidak langsung menciptakan persepsi di masyarakat bahwa pasangan ini tidak merepresentasikan partai, namun merepresentasikan rakyat itu sendiri hingga semakin mendapatkan rasa simpati dari masyarakat. **Ketiga**, maju melalui jalur independen sekaligus mendapatkan dukungan partai politik membuat pasangan petahana Romi Haryanto-Robby Nahliansyah bebas atas mahar politik (*political fee*).

Artinya, sejak dari awal pasangan petahana Romi Haryanto-Robby Nahliansyah tidak memiliki kebutuhan

yang besar terhadap partai politik sebagai kendaraan politik dalam melegitimasi kekuasaannya. Bentuk *Hidden power* lain yang dimiliki petahana independen Romi Haryanto adalah mendapatkan dukungan dari mantan bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2 periode pertama (12 April 2001-12 April 2011), yaitu Drs. H. Abdullah Hich dan mendapat dukungan dari kompetitornya pada pilkada serentak 2015 yang lalu yaitu Hj. Dillah Hikmah Sari, ST yang juga merupakan anak dari Abdullah Hich memberikan dukungan kepada Romi Haryanto-Robby Nahliansyah atas pilihan maju melalui jalur Independen pada pilkada 2020. Sementara itu, Abdullah Hich sebagai mantan orang nomor 1 di Tanjung Jabung Timur menjelaskan bahwa meskipun Romi Haryanto-Robby Nahliansyah maju lewat jalur independen, namun pada kenyataannya, tetap didukung oleh sejumlah partai politik. Hal tersebut memberikan kesimpulan bahwa pasangan ini sangat layak untuk dipilih kembali.

*“ Artinya, beliau berdua ini orang yang patut untuk didukung, tidak cukup satu periode. Tapi harus dua periode biar terlihat pembangunan dan hasilnya,” ujar Abdullah Hich (Suratno, 2020).*

Sementara itu, Dillah Hikmah Sari juga memberikan dukungannya kepada pasangan petahana Romi

Haryanto-Robby Nahliansyah maju dalam pilkada serentak 2020. Dillah Hikmah Sari diberikan amanat oleh pasangan petahana sebagai Ketua Tim Keluarga Romi-Robby.

*“Insya Allah tim DiGas semuanya bergabung ke Romi-Robby, kita harus bersama-sama memastikan pembangunan daerah ini berkesinambungan. Saya juga bertemu dengan banyak teman-teman yang dulu pentolan DiGas. Saya mengingatkan agar ini waktunya bersatu dan bekerja,” ujar Dillah Hikmah Sari (Jambiekspres, 2020).*

Bergabungnya mantan bupati 2 periode (Abdullah Hich) ke barisan Romi Haryanto, serta diberikannya amanat oleh Romi Haryanto kepada kompetitor politiknya pada 2015 yang lalu (Dillah Hikmah Sari)—sebagai Ketua Tim Keluarga Romi-Robby yang memiliki basis relawan pentolan DiGas (sebutan tim pemenangan Dillah pada pilkada 2015 lalu)—memberikan sinyal bahwa ada upaya Romi Haryanto melakukan lobi-lobi politik terhadap Dillah Hikmah Sari sebagai bagian dari tim pemenangannya dalam upaya mempertahankan peluang kemenangan.

Salah satu orang yang memiliki modal politik dan modal sosial yang cukup untuk menjadi batu sandungan Romi Haryanto dalam mengamankan kemenangannya pada pilkada serentak 2020 adalah Dillah Hikmah Sari.

Ia memiliki modal politik sebagai kompetitor politik, selain juga merupakan anak mantan bupati 2 periode pertama, Abdullah Hich. Dua modal tersebut setidaknya menjadikannya dapat dilirik oleh beberapa partai politik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk PAN. Mengingat, Abdullah Hich merupakan pentolan kader PAN di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Upaya Romi Haryanto mengajak Dillah Hikmah Sari ke dalam barisannya, setidaknya menjadi alasan beberapa partai politik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, termasuk PAN yang memiliki kursi mayoritas, memberikan dukungan kepada petahana independen.

Penulis melihat bahwa partai politik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, termasuk PAN, tidak memiliki calon potensial yang bisa dijadikan lawan tanding petahana Romi Haryanto. Satu-satunya kandidat potensial yang bisa menjadi kompetitor Romi Haryanto adalah Dillah Hikmah Sari. Tetapi, ia malah berbalik mendukung Romi Haryanto untuk kembali memimpin kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga tahun 2024. Seperti yang dapat dipahami bahwa fokus *hidden power* yaitu pada kontrol aktual terhadap proses pengambilan keputusan, bagaimana aktor kuat mempertahankan pengaruhnya, dan Romi Haryanto sebagai petahana yang maju melalui jalur independen sudah mempertimbangkan

kemungkinan-kemungkinan tersebut untuk tetap dapat mempertahankan pengaruhnya dengan cara menutup kemungkinan kandidat potensial yang dapat menjadi hambatannya dalam memenangkannya pada pilkada serentak 2020.

### **Kekuasaan Tidak Terlihat Petahana Romi Haryanto**

Kekuasaan yang tidak terlihat (*invisible power*) merupakan salah satu bentuk kekuasaan yang dapat digunakan pada konteks demokrasi lokal, khususnya pada momen pilkada, dialektika sebuah kekuasaan secara tidak kasat mata di liat oleh publik dapat dianalisis dengan menggunakan bentuk kekuasaan yang tidak terlihat (*invisible forms of power*). Lebih lanjut Luttrell, Bird, Byrne, & Carter (2007) menjelaskan bahwa petahana dapat menginternalisasi norma dan nilai masyarakat hingga dapat memengaruhi individu secara tidak sadar dapat mengontrol perilaku mereka sendiri untuk memenuhi harapan sosial melalui peranan tokoh masyarakat baik dari pemuka agama dan pemangku adat dalam momen politik. Dengan demikian, penggunaan nilai-nilai dan ideologi melalui elit politik yang berbasis agama dan daerah adalah suatu keniscayaan sebagai modalitas politik dan konsekuensi dari stratifikasi

sosial-masyarakat melalui rayuan simbolik (Fadli *et al.*, 2018, pp. 132–134).

Salah satu bentuk *invisible power* oleh petahana melalui peranan pemuka agama terlihat pada saat Romi Haryanto melakukan blusukan ke kecamatan Kuala Jambi pada 24 Oktober 2020, 2 bulan sebelum masa pencoblosan pilkada serentak 9 Desember 2020. Kunjungan Romi Haryanto ke kecamatan Kuala Jambi dianggap bukan sekedar momentum pilkada saja oleh tokoh agama setempat, bahkan sebelum ia menjadi bupati saat masih menyandang sebagai ketua DPRD Tanjung Jabung Timur, ia sudah rajin sulaturahmi ke warga di kecamatan Kuala Jambi.

*“Kunjungan Romi bukan karena mau pilkada saja. Sebelum ia menjadi Bupati saat masih menyandang sebagai Ketua DPRD ia sangat rajin silaturahmi ke warga khususnya di kecamatan Kuala Jambi, nama Romi sudah sangat familiar di kami,” ucap Ustad H. Ahmad (Pemayang.com, 2020).*

Romi Haryanto menjelaskan bahwa tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan warga Kuala Jambi baginya tidak asing. Mengingat sejak puluhan tahun lalu, ia sudah akrab dan bergaul dengan warga, tokoh agama, dan tokoh masyarakatnya.

*“Tak ada batasan lagi antara saya dengan warga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya masyarakat Kuala Jambi. Saya dianggapnya bersaudara yang saling peduli, dan saya yakin akan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat disini, jadi saya yakin Kuala Jambi ini basis kami,” pungkask Romi Haryanto (Pemayung.com, 2020).*

Bentuk *invisible power* tersebut juga dilakukan Romi Haryanto di tempat lain, dimana semasa kampanye, Romi Haryanto jarang menggelar kampanye di tempat umum dengan menghadirkan banyak orang dalam satu tempat. Hal ini menjadi komitmen pasangan petahana dalam meminimalisir penyebaran covid-19 dalam kampanye.

*“kampanye yang dilakukan lebih kepada blusukan, mendatangi masyarakat satu per satu. Pola kampanye seperti ini memang lebih menguras tenaga, karena pasangan calon harus bekerja ekstra. Namun dimasa pandemi covid-19, sebagai calon pemimpin harus memberikan contoh baik bagi masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan,” pungkask Romi Haryanto (Pemayung.com, 2020).*

Apa yang dilakukan oleh Romi Haryanto merepresentasikan bahwa tipologi masyarakat merupakan acuan dasar para kontestan politik dengan membuat pemetaan dalam menyerap dukungan dari bawah. Bila kehidupan sosial-masyarakat lebih

mengedepankan pemberian kekuasaan secara simbolik, maka relasi emosional masyarakat lebih mudah terpetakan sehingga apa yang menjadi instruksi seorang elit politik agama atau pemangku adat menjadi lebih efektif dan efisien. Oleh sebab itu, kampanye dengan metode blusukan dengan menemui para tokoh agama, tokoh masyarakat dalam masyarakat daerah yang memiliki akar tradisi akan lebih suka di arahkan oleh para tetua agama, atau tokoh agama dan tokoh masyarakat melalui arahan serta instruksi lisan (Chalik, 2017, p. 373).

Bisa dikatakan bahwa momentum pilkada serentak 2020 menjadi momentum Romi Haryanto. Mengingat, relasi yang sudah lama terbangun antara dirinya dengan warga masyarakatnya, metode kampanyenya yang blusukan di masa pandemi dengan mengunjungi masyarakat satu per satu, bertemu tokoh agama, tokoh masyarakat secara langsung, dan banyak menerima masukan dan saran dari masyarakat yang didatanginya, diperkuat dengan narasi bahwa Romi Haryanto sangat yakin mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat diasumsikan bahwa *invisible power* yang telah dimiliki oleh Romi Haryanto sejak lama dapat mendukung dan memenangkannya pilkada serentak 2020. Bahkan,

dengan tanpa menggunakan kendaraan partai politik sekalipun. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh calon kompetitor lain dalam kontestasi pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## **KESIMPULAN**

Fenomena petahana independen yang terjadi jika dilihat dari perspektif teori *powercube* oleh John Gaventa yang memahami kekuasaan dalam tiga kerangka dimensi, yaitu dimensi level, dimensi ruang, dan dimensi bentuk setidaknya relevan dalam memahami proses terciptanya pilihan maju jalur independen oleh petahana Romi Haryanto. Dimensi level dalam tingkatan nasional dan lokal mengalami konflik dan faksionalisme di tubuh internal partai PAN, baik pusat maupun di tingkat lokal. Gejolak yang terjadi di internal PAN ini ditakutkan dapat memengaruhi dan menyandera petahana dalam memuluskan langkahnya memenangkan konstelasi politik pilkada serentak 2020. Oleh sebab itu, petahana melihat ada potensi menang jika maju melalui jalur independen.

Hal tersebut terlihat di dimensi ruang atas penciptaan jalur independen oleh petahana dengan mengorganisasikan tim internalnya untuk mendapatkan

dukungan KTP sebagai syarat maju jalur independen. Potensi tersebut makin menguat ketika petahana dapat dengan mudah mendapatkan dukungan KTP sebanyak 80.000 dukungan lebih banyak dari syarat yang ditentukan oleh KPUD untuk maju jalur independen. Di dimensi ruang ini juga petahana dalam proses mendapatkan KTP masyarakat tidak diketahui oleh petinggi partai PAN di provinsi Jambi, terlebih oleh A. Bakrie sebagai Ketua DPW PAN Jambi yang tidak tahu-menahu proses majunya Romi Haryanto jalur independen.

Petahana sangat menyadari pilihan maju jalur independen adalah kehilangan mesin partai yang selama ini mendukungnya. Atas konsekuensi tersebut, dimensi bentuk *powercube* oleh petahana memaksimalkan penggunaan bentuk-bentuk kekuasaan, seperti *visible power*, *hidden power*, dan *invisible power* untuk memenangkannya pada pilkada serentak 2020. Dalam dimensi bentuk inilah *power* petahana sangat terlihat, khususnya pada *hidden power*. *Hidden power* petahana memengaruhi keputusan-keputusan elit di tingkat lokal dalam mengamankan kemenangannya pada pilkada serentak 2020.

## **ACKNOWLEDGEMENT**

Penulis menyampaikan banyak-banyak rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian ini sebagai tugas akhir skripsi untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hingga dapat menjadi artikel jurnal yang di *publish* di PolGov Universitas Gadjah Mada.

## **AFILIASI LEMBAGA DAN PEMBIAYAAN**

Artikel jurnal ini berasal dari tugas akhir skripsi yang berjudul “Petahana Independen dalam Perspektif Powercube (Studi Kasus Majunya Pasangan Petahana Romi Haryanto-Robby Nahliansyah dalam Pilkada Serentak Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2020)” yang dibuat oleh penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini dibiayai secara mandiri dan penulis tidak menerima pembiayaan dari lembaga manapun termasuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan dari Petahana Independen yang penulis angkat sebagai tema penelitian skripsi.

## REFERENSI

- Azanella, L. A., & Dewi, R. K. (2018). 64 Kepala Daerah Petahana Terpilih Pada Pilkada Serentak 2018. *PT. Kompas Cyber Media*, 1–3. <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/26/18520301/64-kepala-daerah-petahana-terpilih-pada-pilkada-serentak-2018?page=3&source=autonext>
- Baharuddin, T., & Purwaningsih, T. (2017). Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 205–237. <https://doi.org/10.18196/jgpp.4176>
- Chalik, A. (2015). Elite Lokal Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Di Jawa Timur. *KARSA : Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 23(2), 363–381.
- Chalik, A. (2017). *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*. Pustaka Pelajar.
- CNN Indonesia. (2020). 290 Calon Petahana Maju Pilkada di 236 Daerah. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201001093637-20-553036/290-calon-petahana-maju-pilkada-di-236-daerah>

- Fadli, A. M. D., Tobarasi, I., & Rusba, K. (2018). KEMENANGAN PETAHANA DALAM KONTESTASI PILKADA SERENTAK 2018: DITINJAU DARI PERSPEKTIF POWERCUBE. *Jurnal TAPIS*, 14(2), 1–24.
- Faruq, K. (2018). Di Istana Bogor, 33 Bupati Sampaikan Dukungan Jokowi 2 Periode. *Ivooxid*. [https://ivooxid.id/di-istana-bogor-33-bupati-sampaikan-dukkungan-jokowi-2-periode?tag\\_from=ivoox-react](https://ivooxid.id/di-istana-bogor-33-bupati-sampaikan-dukkungan-jokowi-2-periode?tag_from=ivoox-react)
- Gaventa, J. (2006). Finding the Spaces for Change: A Power Analysis. *IDS Bulletin*, 37(6), 23–33.
- Halim, A. (2014). *Politik Lokal: Pola, Aktor, & Alur Dramatikalnya (Perspektif Teori Powercube, Modal dan Panggung)*. LP2B.
- IMCNews.ID. (2020a). Komentar Romi Soal Isu Mahar untuk Dapat Dukungan PAN. *IMCNews.ID*. <https://imcnews.id/komentar-romi-soal-isu-mahar-untuk-dapat-dukkungan-pan>
- IMCNews.ID. (2020b). Nasib Romi di PAN karena Pilih Jalur Independen di Pilbup Tanjab Timur, H Bakri: Romi Tunduk Keputusan DPW. *IMCNews.ID*. <https://imcnews.id/nasib-romi-di-pan-karena-pilih-jalur-independen-di-pilbup-tanjab-timur-h-bakri-romi-tunduk-keputusan-dpw>

- IMCNews.ID. (2020c). Romi Haryanto Pilih Jalur Independen, H Bakri : PAN Bukan Partai Kecil. *IMCNews.ID*. <https://imcnews.id/romi-haryanto-pilih-jalur-independen-h-bakri-pan-bukan-partai-kecil>
- Jambiekspres. (2020). Tim Keluarga Romi - Robby Tunjuk Hj Dilla Hich Jadi Ketua Tim. *Jambiekspres*. <https://jambiekspres.co.id/read/2020/09/07/35170/tim-keluarga-romirobby-tunjuk-hj-dilla-hich-jadi-ketua-tim->
- Khoiron, & Siboy, A. (2018). KEMENANGAN PETAHANA (INCUMBENT) PADA PILKADA 2015 DI KOTA SURABAYA DAN KABUPATEN MALANG: STRATEGI POLITIK DAN MARKETING POLITIK. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 3(1), 1–10.
- Marijan, K. (2010). *Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. PT. Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, R. (2017). *KEKALAHAN PETAHANA DALAM PILKADA 2015 DI KABUPATEN LUWU UTARA*. Universitas Hasanuddin Makassar.

- Nawawi, B. P. (2019). *PERILAKU PEMILIH DALAM MENENTUKAN PILIHAN TERHADAP KEPALA DESA PETAHANA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SIMPURSIA KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN WAJO TAHUN 2015* [Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. repository.umy.ac.id/handle/123456789/29148
- Nusantara, I. A. (2020). Manuver politik Calon Penguasa Sabak, Romi Haryanto hingga Penantangannya. *Kantor Berita WAKTOE*. <https://waktoe.com/content/manuver-politik-calon-penguasa-sabak-romi-haryanto-hingga-penantangannya?page=19>
- Pemayang.com. (2020). Blusukan ke Kuala Jambi, Tokoh Agama Sebut Romi Sangat Familiar. *Pemayang.Com*. <https:caping.co.id/news/detailmi/7899426>
- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (2019). Data Mantan Kepala Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur. *Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Tanjabtim*. <https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/72/data-kepala-daerah>
- Powercube.net. (2011a). Expressions of power. *Powercube.Net*. <https://www.powercube.net/other-forms-of-power/expressions-of-power/>

- Powercube.net. (2011b). Power Pack Understanding Power for Social Change. In *Powercube.net*. www.powercube.net
- Powercube.net. (2011c). Spaces of power. *Powercube.Net*. <https://www.powercube.net/analyse-power/spaces-of-power/>
- RADARJAMBI.CO.ID. (2020). PAN Kelabakan Romi - Robi Maju Independent, Bakri : Saya Kira Main - Main. *RADARJAMBI.CO.ID*. <https://radarjambi.co.id/read/2020/02/20/23500/pan-kelabakan-romirobi-maju-independent-bakri--saya-kira-mainmain/>
- Republika.co.id. (2016). Calon Indpenden Masih Sulit Menang. *Republika.Co.Id*. <https://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/16/03/22/04fqgs6-calon-independen-masih-sulit-menang>
- Solihah, R. (2016). Pengaruh Dinamika Internal Partai Terhadap Strategi Politik Partai Amanat Nasional Pasca Kongres Iv Tahun 2015. *Jurnal Wacana Politik*, 1(2), 116–123. <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11053>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

- Suratno, N. (2020). Mantan Bupati Abdullah Hich Dukung Romi-Robby di Pilkada Tanjabtim. *Metrojambi.Com*. <https://www.metrojambi.com/read/2020/12/30/56386/mantan-bupati-abdullah-hich-dukung-romirobby-di-pilkada-tanjabtim>
- TribunJambi.com. (2020). Dipanggil Ketua DPW PAN Jambi, Romi Haryanto Memilih Maju Independen. *TribunJambi.Com*. <https://jambi.tribunnews.com/amp/2020/02/20/dipanggil-ketua-dpw-pan-jambi-romi-haryanto-memilih-maju-independen>
- Vikalista, E., Wati, M. R., & Anwar, T. (2020). MENGUNGGULI SANG PETAHANA : KEMENANGAN SUKAMTA-ABDI RAHMAN DALAM PILKADA DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 5(1), 102–111.
- Wikiwand. (2020). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Wikipedia*. [https://www.wikiwand.com/id/Dewan\\_Perwakilan\\_Rakyat\\_Daerah\\_Kabupaten\\_Tanjung\\_Jabung\\_Timur](https://www.wikiwand.com/id/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Tanjung_Jabung_Timur)



